

## DPRD MINTA GUBERNUR UMUMKAN HASIL AUDIT PROYEK MONUMEN BAHASA



*Batampos.co.id*

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<sup>1</sup> Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak menyetujui rencana Pemerintah Daerah<sup>2</sup> Provinsi Kepulauan Riau untuk melanjutkan pembangunan Monumen Bahasa Melayu (MBM) di Pulau Penyengat.

“Kita setuju. Karena itu memang kebutuhan,” ujarnya, Senin (18/2/2019). Namun Jumaga menyatakan sebelum proses penganggaran untuk melanjutkan pembangunan itu dilakukan, DPRD Kepri meminta kepada Pemprov Kepri untuk

---

<sup>1</sup>DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014)

<sup>2</sup>Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

mengumumkan secara terbuka hasil audit<sup>3</sup> dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)<sup>4</sup> terhadap proyek itu kepada publik.

Menurut Jumaga, DPRD sudah mendapatkan informasi bahwa hasil audit BPKP sudah berada di inspektorat Kepri sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah<sup>5</sup>. “Kita minta buka dulu hasilnya ke publik. Tujuannya agar ada transparansi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kepri Mirza Bahtiar mengatakan, hasil audit BPKP terhadap proyek MBM sudah keluar pada Tahun 2015, di era kepemimpinan Gubernur Muhammad Sani. Kemudian, sebutnya, di Tahun 2018 kemarin Gubernur Nurdin Basirun kembali mengajukan permintaan kepada BPKP untuk melakukan audit terhadap proyek senilai Rp. 12,5 miliar ini.

“Untuk hasil audit yang diajukan Tahun 2018 lalu, kemungkinan masih dalam proses. Sebab sampai saat ini kami belum menerima tembusan hasilnya,” ujarnya.

Mirza juga menyebutkan, bahwa terkait proyek MBM di Penyengat itu, pihak Polda<sup>6</sup> Kepri ternyata sudah bergerak mulai melakukan penyelidikan<sup>7</sup> dan ia juga mengaku dirinya telah dimintai keterangan terkait proyek tersebut.

Terkait penyelidikan yang tengah dilakukan Polda Kepri tegas Mirza, dirinya tidak mengetahui siapa pihak yang melaporkan ke Polda Kepri atas proyek

---

<sup>3</sup>Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

<sup>4</sup>Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawas intern pemerintah. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

<sup>5</sup>Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. (Pasal 1 ayat (46) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

<sup>6</sup> Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. ( Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah)

<sup>7</sup> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. ( Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

itu. “Bisa saja yang melaporkan itu dari masyarakat. Tapi untuk siapa yang melapor kita tidak diberi tahu. Saya hanya sebatas diminta keterangan saja,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, pembangunan MBM belum bisa dilanjutkan, karena masih menunggu hasil audit dari BPKP. Sebab menurut Nurdin, apabila sudah ada hasil dan petunjuk BPKP atas pembangunan yang sudah dikerjakan itu, maka bisa mengambil langkah selanjutnya. Apakah pembangunan monumen itu masih bisa dilanjutkan atau tidak. Untuk kepastiannya tentunya menunggu arahan dan petunjuk BPKP atas hasil audit tersebut.

Mantan Bupati Karimun ini juga menegaskan bahwa Pemprov Kepri berkomitmen akan meneruskan pembangunan MBM di Penyengat ini, sesuai harapan pemimpin sebelumnya agar di Penyengat ini ada monumen sejarah yang bisa dibanggakan.

#### **Sumber Berita :**

Hariankepri.com, DPRD Sepakat Monumen Bahasa Dilanjut, Tapi Buka Dulu Hasil Audit, Senin, 18 Februari 2019

<https://www.hariankepri.com/dprd-sepakat-monumen-bahasa-dilanjut-tapi-buka-dulu-hasil-audit/>

Batamtoday.com, Polda Kepri Mulai Lirik Kasus Monumen Bahasa Pulau Penyengat, Selasa, 19 Februari 2019

<https://m.batamtoday.com/berita125263-Polda-Kepri-Mulai-Lirik-Kasus-Monumen-Bahasa-Pulau-Penyengat.html>

Kepri.antaranews.com, DPRD Minta Gubernur Umumkan Hasil Audit Proyek Monumen Bahasa, Rabu, 20 Februari 2019

<https://kepri.antaranews.com/berita/53451/dprd-minta-gubernur-umumkan-hasil-audit-proyek-monumen-bahasa>

Sindobatam.com, Pembangunan MBM Dilanjutkan, Hasil Audit BPKP Harus Dibuka, Rabu, 20 Februari 2019

<http://sindobatam.com/pembangunan-mbm-dilanjutkan-hasil-audit-bpkp-harus-dibuka/>